BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan suatu kota merupakan dampak dari perkembangan kegiatan kota. Perkembangan kota yang cepat dan tidak terkendali mengakibatkan tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh perkotaan. Terciptanya kawasan kumuh merupakan dampak negatif dari sebuah konsep pembangunan yang hanya dapat ditangani dengan memahami permasalahan yang ada di dalam kawasan tersebut secara terinci dan terarah. Minimnya tingkat pendidikan, kemampuan berusaha yang rendah serta kurangnya kesadaran lingkungan merupakan faktor utama yang mempengaruhi terciptanya permukiman di suatu kawasan.

Kondisi ini kemudian diperburuk lagi dengan menurunnya kualitas lingkungan akibat tidak tersedianya infrastruktur kota yang memadai. Hal ini sering dipicu dari pembangunan/pengembangan wilayah kota yang tidak tegas mempertahankan konsep tata ruang yang telah ada. Kualitas sebuah kota sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat yang layak yang dapat menunjang proses kegiatan keseharian masyarakatnya. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakatnya. Untuk menjamin terbentuknya suatu sistem sarana dan prasarana masyarakat yang layak tersebut maka dibutuhkan program penataan dan rehabilitasi bagi kawasan kumuh.

Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang berkembang sangat pesat dalam menjalankan perannya sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, sosial dan budaya. Maka tidak heran, jika kondisi ini menjadi pendorong terjadinya urbanisasi. Jumlah pendatang masuk ke Kota Palembang untuk mengadu nasib tiap tahunnya semakin bertambah. Namun terkadang semua angan-angan pendatang untuk menaikkan taraf hidup, justru yang terjadi kehadirannya sering kali menjadi beban kota. Secara umum permasalahan ini dapat terlihat dari pola perumahan dan permukiman yang ada di Kota Palembang.

Berdasarkan hasil penyusunan database permukiman kumuh tahun 2002 dan 2009 dengan kriteria sebagai berikut:

Kriteria A : tata ruang (kesesuaian peruntukan)

Kriteria B : status kepemilikan lahan

Kriteria C : letak/kedudukan lokasi

Kriteria D : tingkat/derajat kekumuhan

Diperoleh 48 kelurahan di Kota Palembang yang termasuk kategori kumuh seperti yang tertera pada tabel 1.1 di bawah ini

Tabel 1.1 Data Pemukiman Kumuh Kota Palembang Tahun 2002 dan 2009

No	Kecamatan	Kelurahan	Tingkat	Tingkat
			Kekumuhan	Kekumuhan
			Tahun 2002	Tahun 2009
1	Kemuning	Ario Kemuning	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
2	Kemuning	Pahlawan	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
3	Kalidoni	Sungai Lais	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
4	Kalidoni	Sungai Selincah	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
5	Gandus	Karang Jaya	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang

	C 1	17.	IZ 1 D :	17 1 0 1
6	Gandus	Karang Anyar	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
7	Ilir Barat I	Bukit Lama	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
8	Ilir Barat II	Kemang Manis	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
9	Ilir Barat II	35 Ilir	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
10	Ilir Barat II	32 Ilir	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
11	Ilir Barat II	30 Ilir	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
12	Ilir Barat II	29 Ilir	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
13	Ilir Barat II	28 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
14	Ilir Barat II	27 Ilir	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
15	Seberang Ulu I	1 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Berat
16	Seberang Ulu I	2 Ulu	Kumuh Berat	Kumuh Berat
17	Seberang Ulu I	3-4 Ulu	Sangat Kumuh	Sangat Kumuh
18	Seberang Ulu I	5 Ulu	Sangat Kumuh	Sangat Kumuh
19	Seberang Ulu I	7 Ulu	Sangat Kumuh	Sangat Kumuh
20	Seberang Ulu I	9-10 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Berat
21	Seberang Ulu II	16 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
22	Seberang Ulu II	14 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Berat
23	Seberang Ulu II	13 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Berat
24	Seberang Ulu II	12 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
25	Seberang Ulu II	11 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Berat
26	Seberang Ulu II	Tangga Takat	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
27	Ilir Timur I	14 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
28	Ilir Timur I	16 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
29	Ilir Timur I	20 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
30	Ilir Timur I	20 Ilir D-I	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
31	Ilir Timur I	20 Ilir D-IV	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
32	Bukit Kecil	22 Ilir	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
33	Bukit Kecil	19 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
34	Ilir Timur II	Lawang Kidul	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
35	Ilir Timur II	Duku	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
36	Ilir Timur II	2 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
37	Ilir Timur II	8 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
38	Ilir Timur II	10 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
39	Ilir Timur II	Sungai Buah	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
40	Kertapati	Keramasan	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
41	Kertapati	Kertapati	Sangat Kumuh	Kumuh Berat
42	Sukarame	Kebun Bunga	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
43	Seberang Ulu I	8 Ulu	Kumuh Sedang	Sangat Kumuh
44	Seberang Ulu I	Silaberanti	Kumuh Sedang	Kumuh Berat
45	Seberang Ulu I	Tuan Kentang	Kumuh Sedang	Kumuh Berat
46	Seberang Ulu II	15 Ulu	Kumuh Sedang	Kumuh Berat
47	Kertapati	Ogan Baru	Kumuh Sedang	Kumuh Berat
48	Kertapati	Kemang Agung	Kumuh Sedang	Kumuh Berat
	er : Profil Strategis Per		·	

Sumber : Profil Strategis Penataan/Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Kota Palembang

Dari tabel 1.1 di atas, terdapat 3 Kelurahan yang dulu termasuk kategori sangat kumuh pada tahun 2002 dan pada tahun 2009 tetap termasuk kategori sangat kumuh yaitu Kelurahan 3-4 Ulu, Kelurahan 5 Ulu dan Kelurahan 7 Ulu. Tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan perbandingan luas, jumlah dan kepadatan penduduk pada kecamatan Seberang Ulu 1 yang menjadi indikator dalam penentuan obyek penelitian.

Tabel 1.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Pada Kecamatan Seberang Ulu 1

				PENDUDUK		N BANGUNAN
NO	KELURAHAN	LUAS (ha)	JUMLAH (jiwa)	KEPADATAN (jiwa/ha)	JUMLAH (unit)	KEPADATAN (unit/ha)
			SEBER	ANG ULU I		
1	15 Ulu	60,00	18.229,00	303,82	3.473,00	57,88
2	1 Ulu	51,30	13.230,00	257,89	1.223,00	23,84
3	Tuan Kentang	36,50	12.067,00	330,60	2.983,00	81,73
4	2 Ulu	18,00	8.939,00	496,61	668,00	37,11
5	3/4 Ulu	25,00	20.508,00	820,32	2.412,00	96,48
6	5 Ulu	18,40	24.754,00	1.345,33	5.525,00	300,27
7	7 Ulu	60,00	18.522,00	308,70	505,00	8,42
8	8 Ulu	29,70	10.721,00	360,98	2.066,00	69,56
9	Silaberanti	32,40	16.829,00	519,41	3.800,00	117,28
10	9/10 Ulu	35,50	14.134,00	398,14	2.500,00	70,42
	l .	1				

Sumber: Kecamatan Seberang Ulu 1 Dalam Angka, 2009

Selain ketiga kriteria di atas, ada beberapa kriteria lain yaitu karakteristik fisik lahan pemukiman, lingkungan sarana dan prasarana serta sosial ekonomi masyarakat

(tabel 4.1 s/d 4.9). Dari tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa dari 3 kelurahan yang termasuk kategori sangat kumuh, Kelurahan 5 Ulu adalah kelurahan yang persentase ketidaksesuaian kebutuhan akan perumahan dengan pertumbuhan penduduk paling tinggi. Perkembangan kawasan perumahan dan permukiman yang sangat cepat dan cenderung sporadis apabila dibiarkan terus menerus akan menjadi permasalahan perkotaan yang kompleks diantaranya kawasan kumuh, vitalitas kawasan yang semakin menurun, fungsi lahan berubah dan infrastruktur yang terlalu terbebani.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis kajian Identifikasi Kawasan Kumuh di Kota Palembang (Studi Kasus di Kecamatan Seberang Ulu 1)

1.2. Perumusan Masalah

- 1. Mengidentifikasi kawasan pemukiman kumuh di Kecamatan Seberang Ulu 1.
- Mengidentifikasi kondisi dan permasalahan umum penyebab terjadinya kawasan kumuh berdasarkan karakteristik kawasan.
- 3. Solusi dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di pemukiman kumuh di Kecamatan Seberang Ulu 1.

1.3. Tujuan Penelitian

- 1. Mengetahui kawasan pemukiman kumuh di Kecamatan Seberang Ulu 1.
- Mengetahui kondisi dan permasalahan umum penyebab terjadinya kawasan kumuh berdasarkan karakteristik kawasan.

3. Memberikan solusi dan strategi terhadap permasalahan yang terjadi di pemukiman kumuh di Kecamatan Seberang Ulu 1.

1.4. Ruang Lingkup

Karena luasnya daerah penelitian di Kecamatan Seberang Ulu 1, maka penelitian ini hanya dibatasi di wilayah Kelurahan 5 Ulu berdasarkan atas kriteria luas, jumlah dan kepadatan penduduk, karakteristik fisik lahan pemukiman, lingkungan sarana dan prasarana serta sosial ekonomi masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Operasional

- a. Sebagai bahan informasi dalam menyusun rencana pembangunan dan pengembangan permukiman kumuh di Kota Palembang.
- b. Sebagai bahan penunjang dalam menentukan kebijakan pembangunan dan pengembangan permukiman kumuh di Kota Palembang.

2. Manfaat Akademis

- a. Sebagai bahan masukan tentang pentingnya penanganan masyarakat yang tinggal di Kawasan Permukiman Kumuh
- Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang akan mendalami kasus serupa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permukiman Kumuh

Pengertian permukiman kumuh (slum settlement) sering dicampuradukan dengan pengertian permukian liar (squatter settement). Oleh karena itu perlu dijelaskan dahulu perbedaan umum dari keduanya agar tidak membingungkan. Pada dasarnya a squatter adalah orang yang menghuni suatu lahan yang bukan bukan haknya, atau tanpa ijin dari pemiliknya. Pengertian miliknya atau permukiman liar ini mengacu pada legalitas, baik itu legalitas kepemilikan lahan/tanah, penghunian atau pemukiman, serta pengadaan sarana dan prasarananya. Permukiman liar ini mempunyai sejumlah nama lain diantaranya adalah permukiman informal (informal settlement) permukiman tidak resmi (unauthorized settlement), permukiman spontan (spontaneous settlement) dan permukiman yang tidak terencana atau tidak terkontrol (unplanned and uncontrolled *settlement*) Sedangkan pengertian permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas. Permukiman kumuh dapat diartikan sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk (deteriorated) baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya, bahkan dapat pula dikatakan

bahwa para penghuninya benar-benar hidup dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya.

Pada umumnya permukiman kumuh diwarnai oleh tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tingkat kepadatan hunian sangat tinggi, tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi/sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai oleh tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragamnya norma sosial budaya yang dianut. Kumuh atau slum adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di pinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan oleh Suparlan. Tetapi pada perincian ini permukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim. (Raharjo, 2005:147)

Charter Adam (1984) menamakan permukiman di lingkungan kumuh sebagai kampung gembel dengan ciri bangunan liar di atas tanah yang tidak sah. Menurut E.E. Bergel (1970) permukiman kumuh disebutnya sebagai daerah slum yang bukan

saja dari segi fisik tetapi juga dari segi sosial. Soemadi (1990) menyatakan perkampungan kumuh adalah bagian dari kota yang jorok, bangunan-bangunan yang tidak memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh orang miskin dengan fasilitas tempat pembuangan sampah, maupun fasilitas air bersih tidak memenuhi syarat kesehatan.

Menurut UU No. 4 Pasal 22 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Permukiman Kumuh adalah Permukiman tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.

Dengan melihat beberapa teori tersebut di atas maka pengertian permukiman kumuh dalam penelitian ini adalah suatu daerah slum area yang tidak layak huni, tidak memenuhi syarat kesehatan, dengan kondisi lingkungan permukiman tanpa sanitasi, dimana utilitas permukiman tanpa pengelolaan yang baik, bangunan yang relatif kecil, berdempet-dempetan, fasilitas permukiman sangat kurang, kualitas bangunan rendah dan bersifat kotemporer atau darurat.

Untuk itu kajian penanganan permasalahan kumuh tersebut harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama dalam rangka membangun kualitas hunian layak dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Salah satu upaya yaitu melakukan

studi indetifikasi untuk mendapatkan informasi tingkat kekumuhan dalam rangka merumuskan strategi kebijakan, seperti kajian dalam penelitian ini dengan studi pada kawasan kumuh di Kelurahan 5 Ulu dimana telah tergolong sebagai lingkungan permukiman kumuh.

2.2 Lingkungan Permukiman Kumuh

Raharjo (2005:148-149) mengemukakan pengertian lingkungan permukiman kumuh secara umum di daerah perkotaan yakni dapat dilihat sebagai Berikut : 1.Dari segi fisik

Pada umumnya ukuran persil dan tanah sempit serta dibawah standar dalam arti ratio luas ruang tempat tinggal per satu jiwa sangat rendah, pola penggunaan lahan tidak teratur, letak dan bentuk bangunan tidak teratur prasarana fisik lingkungan seperti air minum, drainase, air limbah dan sampah dibawah standar atau sama sekali tidak ada. Kesehatan lingkungan sangat rendah kurang sempurnya pembuangan air limbah rumah tangga dan sampah sehingga sering terkena wabah penyakit. Jaringan jalan tidak beraturan, kondisi bangunan pada umumnya terbuat dari material temporer atau semi permanen dan umumnya dalam keadaan kurang memenuhisyarat.

2.Dari segi sosial

Lingkungan yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang padat dalam area yang terbatas. Mayoritas pendapatan penduduk rendah, tingkat pendidikan masyarakat

rata-rata rendah, hubungan antara individu kegotongroyongan lebih menonjol dibandingmasyarakatpadabagiankotalainnya.

3.Dari segi hukum

Sebagaian besar kawasan kumuh umumnya terbentuk tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan karena langka dan mahalnya lahandiperkotaan

4.Dari segi ekonomi

Umumnya terdiri dari masyarakat dengan pola mata pencaharian yang heterogen, tingkat produktivitas dan kesehatan lingkungan rata-rata rendah, sektor perekonomian bersifat informal seperti penarik becak, buruh, pedagang kaki lima, dan tingkat pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.3 Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah/hunian dan kondisi lingkungan masyarakat dikawasan tersebut sangat buruk kualitasnya. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

Ciri-ciri pemukiman kumuh seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan adalah :

- 1) Fasilitas umum kondisinya kurang atau tidak memadai.
- 2) Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuniannya kurang mampu secara ekonomi atau miskin.
- 3) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada dipermukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
- 4) Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai :
 - a. Sebuah komuniti tunggal, berada ditanah milik Negara dan sering digolongkan sebagai hunian liar.
 - b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau sebuah RW atau bahkan terwujud sebagai Kelurahan dan bukan hunian liar.
- 5) Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya.
- 6) Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja disektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan sektor informal.

- 7) Perumahan tidak layak huni di mana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial, dengan kriteria antara lain :
 - a. Luas lantai perkapita di kota kurang dari 4 m2 sedangkan di desa kurang dari 10 m2.
 - b. Jenis atap terbuat dari bahan sementara.
 - c. Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum diproses.
 - d. Jenis lantai non perkerasan (tanah)
 - e. Tidak mempunyai fasilitas tempat untuk MCK.

2.4 Karakteristik Kawasan Kumuh

Berdasarkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, karakteristik fisik lingkungan pada kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- 1) Perumahan padat yang tidak teratur
- 2) Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi
- 3) Fasilitas dan sarana lingkungan yang tidak memadai.
- 4) Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.
- 5) Sebagian besar penghuni berpenghasilan tidak tetap
- 6) Tingkat pendidikan rata-rata rendah
- 7) Tingkat penganguran tinggi
- 8) Tingkat kerawanan sosial dan angka kriminalitas cukup tinggi

9) Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan.

2.5 Faktor-faktor penyebab kawasan kumuh

Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan jumlah kawasan kumuh yang ada dikota adalah :

- 1) Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi
- 2) Faktor bencana

2.6 Penelitian Terdahulu

Menurut Marwati, dalam penelitiannya yang berjudul Perumahan dan Permukiman Untuk Rakyat, dinyatakan bahwa permukiman kumuh tumbuh antara lain akibat dari urbanisasi, migrasi yang tinggi, masyarakat berbondong-bondong datang ke kota untuk mencari nafkah, hidup di kota sebagai warga dengan mata pencaharian terbanyak pada sektor informal.

Pada dasarnya pertumbuhan sektor informal bersumber pada urbanisasi penduduk perdesaan ke kota, atau dari satu ke kota lainnya. Hal ini diakibatkan karena lahan pertanian tempat mereka tinggal sudah terbatas, bahkan kondisi desa pun tidak bisa lagi menyerap angkatan kerja yang terus bertambah. Sedangkan masyarakat yang melakukan migrasi dari kota ke kota lain mengakibatkan kota tidak mampu lagi menampung karena lapangan kerja sangat terbatas. Akibatnya, terlihat adanya pemanfaatan ruang yang tidak terencana di beberapa daerah, terjadi

penurunan kualitas lingkungan bahkan kawasan permukiman, terutama di daerah perkotaan yang padat penghuni, berdekatan dengan kawasan industri, kawasan pesisir dan pantai yang dihuni oleh keluarga para nelayan, serta dibantaran sungai, dan bantaran rel kereta api.

Menurut Prayitno dalam penelitiannya yang berjudul Pemikiran Kearah Pembenahan Kawasan Kumuh di Kota Bandung dikemukakan bahwa gejala timbulnya permukiman kumuh sudah mulai dirasakan dengan teridentifikasinya 15 (lima belas) kawasan yang sebagian besar berlokasi di pinggiran sungai/kali yang berfungsi sebagai alat pengglontor Kotamadya Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kemiskinan timbul sebagai akibat semakin berkurangnya pendapatan masyarakat di desa tempat mereka tinggal sehingga menimbulkan urbanisasi yang tinggi dari desa ke kota. Dampak yang timbul dari kasus terebut sangat kompleks. Namun fenomena permukiman kumuh adalah kontribusi dari timbulnya urbanisasi dan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat.

2.7 Kerangka Pemikiran

Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*), melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menetukan secara *rigid* standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.

Disisi lain Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the wlfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin (Syahdan, 2006).

Kontribusi penelitian dalam pemecahan masalah kawasan kumuh dalam penyediaan perumahan dan permukiman saat ini dan masa yang akan datang telah menghasilkan berbagai rekomendasi untuk masukan kebijakan maupun penyusunan pedoman teknis yang berkaitan dengan tata ruang kawasan permukiman sebagai bagian dari kota/desa, lingkungan perumahan, dan bangunan rumah serta prasarana dan sarana lingkungannya.

Dalam pendekatan penerangan perumahan dan permukiman masa depan, terutama permukiman rakyat di daerah perkotaan, yang cenderung kumuh, perlu dipahami lokasi dan karakteristik dominan dari permukiman tersebut, termasuk dinamika masyarakat penghuninya dan basis mata pencahariannya. Dalam kondisi penataan permukiman kumuh dengan kepadatan tinggi dan tanah milik campuran seperti kebanyakan yang ada saat ini, dimasa depan dapat dilakukan dengan program peremajaan berbasis masyarakat, melalui pola *share holder*.

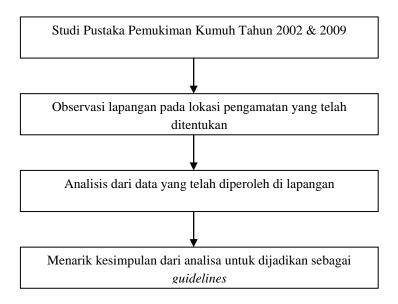
Dari beberapa hasil kajian lapangan tersebut, ternyata sebagian besar masyarakat yang hidupnya pada jalur aktivitas ekonomi informal, belum dapat di akomodasikan dalam tatanan yang disusun pemerintah, baik berupa perangkat, produk pengaturan, pranata kelembagaan termasuk di dalamnya pembiayaan. Berbagai penelitian terapan yang dilakukan untuk membantu pengadaan perumahan dan permukiman bagi rakyat miskin melalui aspek teknologi dan aspek partisipasi masyarakat, diantaranya membangun rumah sederhana/sangat sederhana dengan kontruksi yang rasional dan tepat, menggunakan bahan bangunan lokal, serta tidak memerlukan keterampilan yang tinggi. Pendayagunaan peran masyarakat sebagai salah satu pemeran utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan perumahan dan permukiman, telah diteliti dan diterapkan melalui pembangunan perumahan swadaya, dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman tersebut, dibutuhkan (1). kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama; (2) mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar dengan menitikberatkan kepada

masyarakat miskin; (3) mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung produktifitas masyarakat.

Penelitian ini berdasarkan sekunder Profil Strategis pada data Penataan/Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Kota Palembang di Bappeda Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2002 dan 2009. Dari data sekunder tersebut diperoleh data dan informasi mengenai kondisi wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang ada di kota Palembang berkaitan dengan masalah pemukiman kumuh. Dari data tersebut ditemukan ada 1 kecamatan dimana 3 kelurahannya masuk dalam kriteria kawasan sangat kumuh pada tahun 2002 dan 2009 yaitu Kelurahan 3-4 Ulu, 5 Ulu dan 7 Ulu. Dari 3 wilayah tersebut jika dilihat berdasarkan 3 kategori yaitu luas, jumlah dan kepadatan penduduk, wilayah 5 Ulu adalah wilayah yang kondisi ketidaksesuaian kebutuhan akan perumahan dengan pertumbuhan penduduk paling tinggi. Oleh karena itu kami tertarik menjadikan Kelurahan 5 Ulu sebagai obyek penelitian. Survei yang kami lakukan menggunakan model dan identifikasi berdasarkan ketentuan Bappeda Kota Palembang. Dari hasil survei dan data sekunder selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan scoring I, II dan III . Hasil scoring tersebut dapat mengidentifikasi derajat kekumuhan yang selanjutnya dapat menjadi rujukan untuk penanganan pemukiman kumuh di wilayah 5 Ulu.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Identifikasi lokasi kawasan kumuh

3.1.1. Dasar identifikasi

Dasar dalam identifikasi kawasan permukiman kumuh adalah berdasarkan ciri-ciri permukiman kumuh seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan adalah :

- 1. Fasilitas umum kondisinya kurang atau tidak memadai.
- 2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya kurang mampu secara ekonomi atau miskin.
- 3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
- 4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai :
 - a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik Negara dan sering digolongkan sebagai hunian liar.
 - Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.

- c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau sebuah RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan dan bukan hunian liar.
- Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya.
- 3. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan sektor informal.
- 4. Perumahan tidak layak huni di mana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial, dengan kriteria kriteria berdasarkan antara lain :
 - a. Luas lantai perkapita di kota kurang dari 4 m² sedangkan di desa kurang dari 10 m².
 - b. Jenis atap terbuat dari bahan sementara.
 - c. Jenis dinding dari bahan yang semi atau tidak permanen.
 - d. Jenis lantai non perkerasan (tanah).
 - e. Tidak mempunyai fasilitas tempat untuk MCK.

Karakteristik fisik lingkungan pada kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

- 1. Perumahan padat yang tidak teratur
- 2. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi
- 3. Fasilitas dan sarana lingkungan yang tidak memadai

- 4. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah
- 5. Sebagian besar penghuni berpenghasilan tidak tetap
- 6. Tingkat pendidikan rata-rata rendah
- 7. Tingkat pengangguran tinggi
- 8. Tingkat kerawanan sosial dan angka kriminalitas cukup tinggi
- 9. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan
- 10. Kebanyakan status dan legalitas persil tidak jelas dan tidak teratur

3.1.2. Penentuan Kawasan Kumuh

Dengan mengacu pada ciri-ciri dan karakteristik kawasan kumuh, selanjutnya dilakukan tinjauan terhadap seluruh daerah-daerah yang ada di kota Palembang , dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyusun daftar panjang kota kecamatan-kecamatan yang berada di kota Palembang yang berpotensi kumuh.
- Melakukan tinjauan pada tingkat kawasan pada kota kecamatan-kecamatan terpilih (hasil tinjauan poin 1) berdasarkan kepadatan penduduk dan kepadatan rumah/bangunan.
- 3. Hasil dari tinjauan pada tingkat kawasan pada kecamatan-kecamatan terpilih inilah yang akan diusulkan sebagai lokasi kawasan kumuh, untuk selanjutnya dilakukan tinjauan ke lapangan dan perhitungan tingkat kekumuhan.

3.2. Analisis Lokasi Permukiman Kumuh

3.2.1. Pengelompokan Kriteria

Menurut ketentuan Bappeda Kota Palembang untuk memudahkan di dalam proses pemberian bobot (pembobotan), maka dalam penilaian lokasi tersebut di kelompokan menjadi 4 kriteria utama, yaitu:

Kriteria A : tata ruang (kesesuaian peruntukan)

Kriteria B : status kepemilikan lahan

Kriteria C : letak/kedudukan lokasi

Kriteria D : tingkat/derajat kekumuhan

3.2.2. Metode Penilaian

Untuk menentukan urutan prioritas lokasi yang lebih mudah dalam melakukan proses identifikasi lokasi, metode penilaian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pembobotan dan scoring terhadap kriteria-kriteria lokasi pada masingmasing lokasi kawasan kumuh.

3.2.2.1. Pembobotan

Pemberian bobot pada masing-masing kriteria dimaksudkan bahwa setiap kriteria tersebut memiliki bobot (pengaruh) yang berbeda-beda, yaitu:

1. Pembobotan terhadap kriteria lokasi.

2. Pembobotan terhadap kriteria tingkat (derajat) kekumuhan

3. Pembobotan terhadap kriteria kondisi prasarana dan sarana lingkungan

1. Pembobotan terhadap kriteria lokasi.

Tabel 3.1. Pembobotan terhadap kriteria lokasi

No	Kriteria Lokasi	Bobot (%)
Α	Kesesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang	30
В	Status (pemilik) lahan	10
C	Letak/kedudukan lokasi	10
D	Tingkat (derajat kekumuhan)	50
	Jumlah	100

2. Pembobotan terhadap kriteria tingkat (derajat) kekumuhan

Tabel 3.2.
Pembobotan terhadap kriteria tingkat (derajat) kekumuhan

No	Kriteria derajat kekumuhan	Bobot
		(%)
D1	Tingkat kepadatan penduduk	15
D2	Jumlah penduduk miskin	10
D3	Kegiatan usaha ekonomi penduduk sektor informal	5
D4	Kepadatan rumah dan bangunan	15
D5	Kondisi rumah/bangunan yang tidak layak huni	10
D6	Ketidakteraturan tata letak rumah/bangunan	5
D7	Kondisi prasarana dan sarana lingkungan	25
D8	Tingkat kerawanan kondisi kesehatan dan lingkungan	10
D9	Tingkat kerawanan sosial/kriminalitas dan kesenjangan sosial	5
	Jumlah	100

3. Pembobotan terhadap kriteria kondisi prasarana dan sarana lingkungan

Tabel 3.3.
Pembobotan terhadap kriteria kondisi prasarana dan sarana lingkungan

No	Kriteria derajat kekumuhan	Bobot (%)
D.7.a	Kondisi penyediaan air bersih	20
D.7.b	Kondisi jamban keluarga/MCK	20
D.7.c	Kondisi pengelolaan sampah	15
D.7.d	Kondisi saluran drainase	15
D.7.e	Kondisi jalan setapak	20
D.7.f	Kondisi jalan lingkungan	10
	Jumlah	100

3.2.2.2. Cara Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap kriteria lokasi dan tingkat derajat kekumuhan dan pemberian nilai masing-masing kriteria ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Penilaian terhadap kriteria lokasi dan tingkat derajat kekumuhan
- 2. Penilaian terhadap kriteria kondisi sarana dan prasarana lingkungan

Tabel 3.4. Penilaian terhadap kriteria lokasi dan tingkat derajat kekumuhan

1 chilalah terhadap kriteria lokasi dan tingkat derajat kekumuhan							
No	Kriteria		K	Clasifikasi		Nilai	
	Kesesuaian dengan	> 70	5				
A		50-	70% tidak	sesuai (rev	isi/reviem)	3	
	rencana tata ruang	< 50	% tidka ses	suai (bukan	perumahan)	1	
	C1-1 (1		> 70% m	asyarakat p	emilik	5	
В	Status (kepemilikan) lahan	50-	-70% masy	arakat buk	an pemilik	3	
		<50%	milik pen	nerintah/bac	lan usaha lain	1	
	T -4-1-/1 4 4-1 1-1:	>70 % sangat strategis					
C	Letak/kedudukan lokasi	50-70 % cukup strategis					
	kawasan kumuh	< 50 % kurang strategis					
		Metro	Besar	Sedang			
		>750	>500	>250	Sangat tinggi	5	
D1	Tingkat kepadatan	500-750	250-	150-250	Tinggi	3	
ועו	penduduk		500				
		250-499	150-	100-149	Menengah/	1	
			249		sedang		

D2	Jumlah penduduk miskin	>65% (sangat tinggi)	5
	(pra sejahtera dan	50-65 % (tinggi)	3
	sejahtera)	<50% (menengah)	1
D3	Kegiatan usaha ekonomi	>70% (sangat tinggi)	5
	penduduk di sector	50-70% (tinggi)	3
	informal	<50% (menengah)	1
D4	Kepadatan rumah/	>70% (sangat tinggi)	5
	bangunan	50-70% (tinggi)	3
		<50% (menengah)	1
D5	Kondisi rumah/bangunan	>70% (sangat tinggi)	5
	yang tidak layak huni	50-70% (tinggi)	3
		<50% (menengah)	1
D6	Ketidakteraturan tata letak	>70% (sangat tinggi)	5
	rumah/bangunan	50-70% (tinggi)	3
		<50% (menengah)	1
D7	Kondisi prasarana dan	>70% (sangat tinggi)	5
	sarana lingkungan (sangat	50-70% (tinggi)	3
	terbatas dan kurang	<50% (menengah)	1
	memadai)		
D8	Kerawanan kesehatan dan	>70% (sangat tinggi)	5
	lingkungan (bencana	50-70% (tinggi)	3
	banjir/ alam)	<50% (menengah)	1
D9	Kerawanan sosial (angka	>70% (sangat tinggi)	5
	kriminalitas, kesenjangan	50-70% (tinggi)	3
	sosial)	<50% (menengah)	1

2. Penilaian terhadap kriteria kondisi sarana dan prasarana lingkungan

Tabel 3.5.
Penilaian terhadap kriteria kondisi sarana dan prasarana lingkungan

	Pennaian ternadap kriteria kondisi sarana dan prasarana lingkungan						
No	Kriteria	Klasifikasi	Nilai				
D7.a	Kondisi penyediaan air	> 70 % (sangat rawan)	5				
	bersih	50-70% (rawan)	3				
		< 50% (terbatas)	1				
D7.b	Kondisi jamban	> 70 % (sangat rawan)	5				
	keluarga/MCK	50-70% (rawan)	3				
		< 50% (terbatas)	1				
D7.c	Kondisi pengelolaan	> 70 % (sangat rawan)	5				
	sampah	50-70% (rawan)	3				
		< 50% (terbatas)	1				
D7.d	Kondisi saluran	> 70 % (sangat rawan)	5				
	air/drainase	50-70% (rawan)	3				
		< 50% (terbatas)	1				
D7.e	Kondisi jalan setapak	> 70 % (sangat rawan)	5				
		50-70% (rawan)	3				
		< 50% (terbatas)	1				
D7.f	Kondisi jalan lingkungan	> 70 % (sangat rawan)	5				
		50-70% (rawan)	3				
		< 50% (terbatas)	1				
		(Cibatas)	1				

3.2.2.3. Scoring

Perhitungan scoring dimulai dari kelompok elemen yang paling rendah, kemudian secara berjenjang akan diperoleh besaran scoring. Selanjutnya nilai scoring identifikasi lokasi kawasan kumuh digunakan untuk menyusun rangking untuk prioritas dan penyusunan rencana penanganan di tingkat kota/ibukota kecamatan.

Perhitungan scoring dimulai dari kelompok elemen yang paling rendah, kemudian secara berjenjang akan diperoleh besaran scoring ditetapkan sebagai berikut:

1. (Perhitungan scoring I) kondisi sarana dan prasarana lingkungan

Tabel 3.6. (Perhitungan scoring I) kondisi sarana dan prasarana lingkungan

	(1 Crintungan Scoring 1) Kondisi sarana dan prasarana migkungan						
No	Kriteria	Klasifikasi	Nilai	Bobot	Scoring		
		Kondisi		(%)	(Bobot x nilai)		
		(hasil survey)					
D7.a	Kondisi Penyediaan	%	nD7.a	20	0,20 x nD7.a		
	air bersih						
D7.b	Kondisi jamban	%	nD7.b	20	0.20 x nD7.b		
	keluarga/ MCK						
D7.c	Kondisi pengelolaan	%	nD7.c	15	0,15 x nD7.c		
	sampah						
D7.d	Kondisi saluran	%	nD7.d	15	0,15 x nD7.d		
	air/drainase						
D7.e	Kondisi jalan setapak	%	nD7.e	20	0,20 x nD7.e		
D7.f	Kondisi jalan	%	nD7.f	10	0,10 x nD7.f		
	lingkungan						
Nilai t	ingkat kondisi prasaraı	na dan sarana ling	gkungan		(∑b.n)l		

2. (Perhitungan scoring II) Tingkat derajat kekumuhan

Tabel 3.7. (Perhitungan scoring II) Tingkat derajat kekumuhan

No	Kriteria	Klasifikasi	Nilai	Bobot	Scoring
		Kekumuhan		(%)	(Bobot x nilai)
		(hasil survey)		, ,	
D1	Tingkat kepadatan penduduk	%	n.D1	15	0,15 x n.D1
D2	Jumlah penduduk miskin	%	n.D2	10	0,10 x n.D2
	(pra sejahtera dan sejahtera)				
D3	Kegiatan usaha ekonomi	%	n.D3	5	0,05 x n.D3
	penduduk di sector informal				
D4	Kepadatan rumah/ bangunan	%	n.D4	15	0,15 x n.D4
D5	Kondisi rumah/bangunan	%	n.D5	10	0,10 x n.D5
	yang tidak layak huni				
D6	Ketidakteraturan tata letak	%	n.D6	5	0,05 x n.D6
	rumah/bangunan				
D7	Kondisi prasarana dan	Hasil	(∑b.n)	25	0,25 x (∑b.n)l
	sarana lingkungan (sangat	perhitungan	1		
	terbatas dan kurnag	scoring I			
	memadai)				
D8	Kerawanan kesehatan dan	%	n.D8	10	0,10 x n.D8
	lingkungan (bencana banjir/				
	alam)				
D9	Kerawanan sosial (angka	%	n.D9	5	0,05 x n.D9
	kriminalitas, kesenjangan				
	sosial)				
Nilai	tingkat derajat kekumuhan				(∑b.n)lI

3. (Perhitungan scoring III) Penilaian seluruh langkah identifikasi kawasan kumuh

Tabel 3.8. (Perhitungan scoring III) Penilaian seluruh langkah identifikasi kawasan kumuh

No.	Kriteria	Klasifikasi Kekumuhan	Nilai	Bobot (%)	Scoring (Bobot x
		(hasil survey)			nilai)
A	Kesesuaian peruntukan	%	n.A	30	0,30 x n.A
	dengan rencana tata ruang				
В	Status (kepemilikan) lahan	%	n.B	10	0,10 x n.B
С	Letak/kedudukan lokasi	%	n.C	10	0,10 x n.C
D	Tingkat (derajat kekumuhan	Hasil perhitungan	(∑b.n)l	50	0,50 x
		scoring II	I		(∑b.n)lI
Nilai	identifikasi kawasan kumuh				(∑b.n)lII

Selanjutnya nilai scoring identifikasi lokasi kawasan kumuh (∑b.n)III digunakan untuk menyusun rangking untuk prioritas dan penyusunan rencana penanganan di tingkat kota/ibukota kecamatan.

3..3. Analisis tingkat kekumuhan

3.3.1. Tabulasi data survey

Tabulasi data survey dilakukan terhadap hasil kuesioner yang disebarkan pada usulan lokasi kawasan kumuh. Dari tabulasi data survey ini didapat tingkat kerawanan dari masing-masing kriteria penilaian. Hasil tabulasi data survey selengkapnya terlampir.

3.3.2. Penilajan lokasi kawasan kumuh

Berdasarkan tabulasi data survey selanjutnya dilakukan penilaian terhadap lokasi kawasan kumuh. Penilaian tingkat kekumuhan dilakukan terhadap lokasi-

lokasi yang diusulkan, prosedur penilaian lokasi kawasan kumuh adalah sebagai berikut:

- 1. Menentukan sebaran penilaian seluruh kriteria/indikator.
- 2. Perhitungan tingkat kerawanan kondisi prasarana dan sarana lingkungan.
- 3. Perhitungan tingkat/derajat kekumuhan.
- 4. Penentuan tingkat kekumuhan, dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Jumlah tingkat kekumuhan sama dengan 1 : Tidak kumuh

b. Jumlah tingkat kekumuhan antara 1 s/d sama dengan 3 : Kumuh sedang

c. Jumlah tingkat kekumuhan antara 3 s/d 5 : Kumuh berat

d. Jumlah tingkat kekumuhan sama dengan 5 : Sangat kumuh

5. Penentuan tipologi permukiman kumuh

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH SEBERANG ULU 1

4.1. Profil Kecamatan Seberang Ulu I

Daerah Kecamatan Seberang Ulu I sebagian terletak di pinggir sungai musi yang terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan dengan luas wilayah 1.856,25 Ha yang berbatasan dengan :

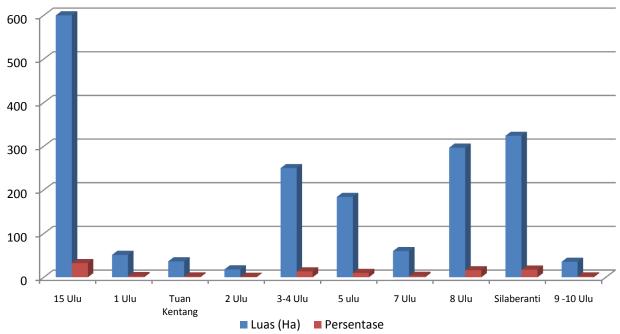
- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Musi di Kecamatan Ilir Barat II
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu II dan Kecamatan
 Plaju
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin
- Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ogan di Kecamatan Kertapati Adapun 10 kelurahan yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I, yaitu :
 - 1. Kelurahan 15 Ulu
 - 2. Kelurahan 1 Ulu
 - 3. Kelurahan Tuan Kentang
 - 4. Kelurahan 2 Ulu
 - 5. Kelurahan 3-4 Ulu
 - 6. Kelurahan 5 ulu
 - 7. Kelurahan 7 Ulu

- 8. Kelurahan 8 Ulu
- 9. Kelurahan Silaberanti
- 10. Kelurahan 9 -10 Ulu.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kecamatan SU I Menurut Kelurahan Pada Tahun 2009

Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1. Kelurahan 15 Ulu	600,00	32,32
2. Kelurahan 1 Ulu	51,25	2,76
3. Kelurahan Tuan Kentang	36,50	1,97
4. Kelurahan 2 Ulu	18,00	0,97
5. Kelurahan 3-4 Ulu	250,00	13,47
6. Kelurahan 5 ulu	184,00	9,91
7. Kelurahan 7 Ulu	60,00	3,23
8. Kelurahan 8 Ulu	297,00	16,00
9. Kelurahan Silaberanti	324,00	17,45
10. Kelurahan 9 -10 Ulu	35,50	1,91

Luas Wilayah Kecamatan SU I Menurut Kelurahan Pada Tahun 2009

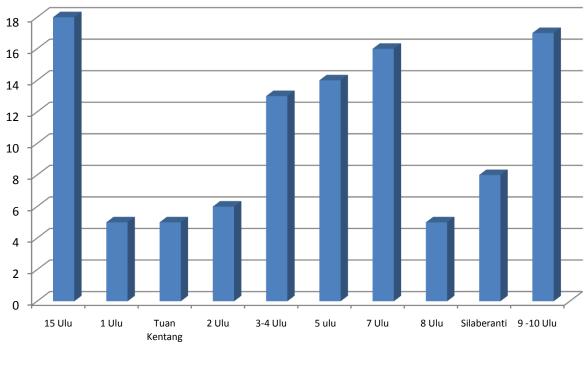


Tabel 4.2. Jumlah Bangunan Dirinci Menurut Jenis Bangunan di Kecamatan SU I Tahun 2009

Kelurahan	Permanen	Semi Permanen	Kayu
1. Kelurahan 15 Ulu	1,875	_*	_*
2. Kelurahan 1 Ulu	475	_*	_*
3. Kelurahan Tuan Kentang	1,483	_*	_*
4. Kelurahan 2 Ulu	301	_*	_*
5. Kelurahan 3-4 Ulu	1,020	_*	_*
6. Kelurahan 5 ulu	2,071	_*	_*
7. Kelurahan 7 Ulu	317	_*	_*
8. Kelurahan 8 Ulu	823	_*	_*
9. Kelurahan Silaberanti	802	_*	_*
10. Kelurahan 9 -10 Ulu	1,261	_*	_*

Ket: -* Data Tidak Tersedia

Jumlah Bangunan Dirinci Menurut Jenis Bangunan di Kecamatan SU I Tahun 2009

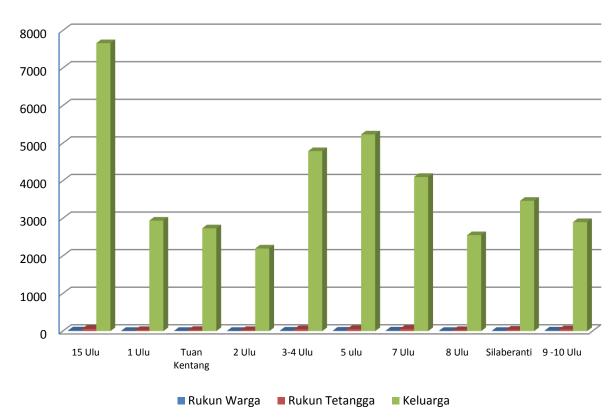


■ Rukun Warga

Tabel 4.3. Jumlah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Keluarga Di Kecamatan SU I Pada Tahun 2009

Kelurahan	Rukun	Rukun Tetangga	Keluarga
	Warga		
1. Kelurahan 15 Ulu	18	63	7.663
2. Kelurahan 1 Ulu	5	30	2.940
3. Kelurahan Tuan Kentang	5	31	2.736
4. Kelurahan 2 Ulu	6	30	2.198
5. Kelurahan 3-4 Ulu	13	52	4.790
6. Kelurahan 5 ulu	14	54	5.234
7. Kelurahan 7 Ulu	16	60	4.102
8. Kelurahan 8 Ulu	5	29	2.553
9. Kelurahan Silaberanti	8	38	3.467
10. Kelurahan 9 -10 Ulu	17	49	2.901

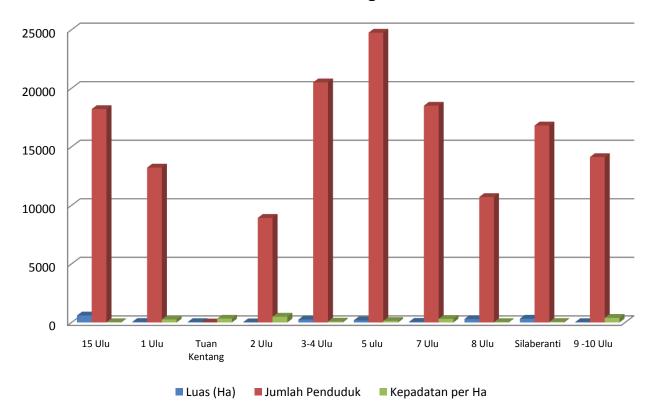
Jumlah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Keluarga Di Kecamatan SU I Pada Tahun 2009



Tabel 4.4. Luas, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Kecamatan SU I Pada Pertengahan Tahun 2009

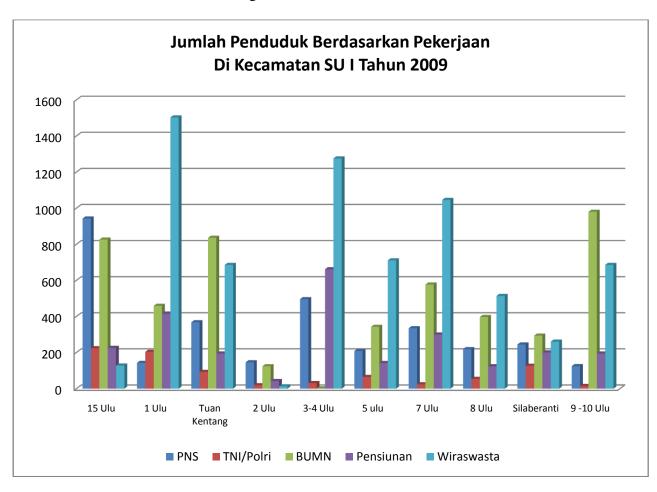
Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
			per Ha
1. Kelurahan 15 Ulu	600,00	18.229	30,4
2. Kelurahan 1 Ulu	51,25	13.230	258,1
3. Kelurahan Tuan Kentang	36,50	12.067	330,6
4. Kelurahan 2 Ulu	18,00	8.939	496,6
5. Kelurahan 3-4 Ulu	250,00	20.508	82,0
6. Kelurahan 5 ulu	184,00	24.754	134,5
7. Kelurahan 7 Ulu	60,00	18.522	308,7
8. Kelurahan 8 Ulu	297,00	10.721	36,1
9. Kelurahan Silaberanti	324,00	16.829	51,9
10. Kelurahan 9 -10 Ulu	35,50	14.134	398,1

Luas, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Kecamatan SU I Pada Pertengahan Tahun 2009



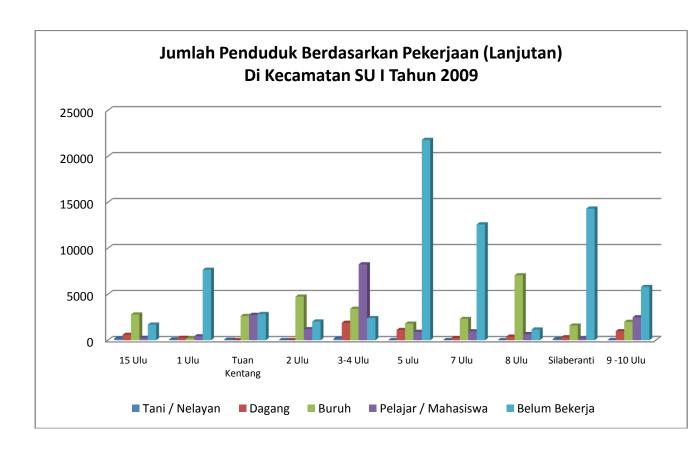
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Di Kecamatan SU I Tahun 2009

Kelurahan	Jenis Pekerjaan				
	PNS	TNI/Polri	BUMN	Pensiunan	Wiraswasta
1. Kelurahan 15 Ulu	943	224	826	226	128
2. Kelurahan 1 Ulu	143	204	459	416	1.503
3. Kel. Tuan Kentang	368	93	836	195	686
4. Kelurahan 2 Ulu	146	19	124	42	13
5. Kelurahan 3-4 Ulu	496	31	1.680	662	1.276
6. Kelurahan 5 ulu	209	65	343	142	711
7. Kelurahan 7 Ulu	335	24	577	300	1.046
8. Kelurahan 8 Ulu	219	54	397	124	514
9.Kelurahan Silaberanti	245	127	294	201	261
10. Kelurahan 9 -10 Ulu	125	15	980	195	686



Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan (Lanjutan) Di Kecamatan SU I Tahun 2009

Kelurahan	Jenis Pekerjaan				
	Tani /	Dagang	Buruh	Pelajar /	Belum
	Nelayan			Mahasiswa	Bekerja
1. Kelurahan 15 Ulu	183	584	2.799	257	1.697
2. Kelurahan 1 Ulu	71	259	193	430	7.660
3. Kel. Tuan Kentang	41	1.278	2.637	2.756	2.844
4. Kelurahan 2 Ulu	4	1.380	4.742	1.199	2.036
5. Kelurahan 3-4 Ulu	160	1.889	3.420	8.253	2.401
6. Kelurahan 5 ulu	-	1.111	1.799	904	21.802
7. Kelurahan 7 Ulu	2	246	2.315	963	12.603
8. Kelurahan 8 Ulu	1	381	7.063	665	1.159
9. Kelurahan Silaberanti	111	314	1.591	193	14.322
10. Kelurahan 9 -10 Ulu	-	980	1.992	2.494	5.794



Tabel 4.7.

Jumlah Keluarga Dirinci Menurut Sumber Penerangan dan Jumlah Pelanggan Telepon Kabel di Kecamatan SU I, Tahun 2009

Kelurahan	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Pelanggan
			Telepon Kabel
1. Kelurahan 15 Ulu	_*	_*	_*
2. Kelurahan 1 Ulu	_*	_*	_*
3. Kelurahan Tuan Kentang	_*	_*	_*
4. Kelurahan 2 Ulu	_*	_*	_*
5. Kelurahan 3-4 Ulu	_*	_*	_*
6. Kelurahan 5 ulu	_*	_*	_*
7. Kelurahan 7 Ulu	_*	_*	_*
8. Kelurahan 8 Ulu	_*	_*	_*
9. Kelurahan Silaberanti	_*	_*	_*
10. Kelurahan 9 -10 Ulu	_*	_*	_*

Ket: -* Data Tidak Tersedia

Tabel 4.8. Jumlah Keluarga Dirinci Menurut Penggunaan Air Untuk Masak Di Kecamatan SU I Pada Tahun 2009

Kelurahan	Ledeng/PAM	Sumur/Perigi	Sungai
1. Kelurahan 15 Ulu	_*	_*	_*
2. Kelurahan 1 Ulu	_*	_*	_*
3. Kelurahan Tuan Kentang	_*	_*	_*
4. Kelurahan 2 Ulu	_*	_*	_*
5. Kelurahan 3-4 Ulu	_*	_*	_*
6. Kelurahan 5 ulu	_*	_*	_*
7. Kelurahan 7 Ulu	_*	_*	_*
8. Kelurahan 8 Ulu	_*	_*	_*
9. Kelurahan Silaberanti	_*	_*	_*
10. Kelurahan 9 -10 Ulu	_*	_*	_*

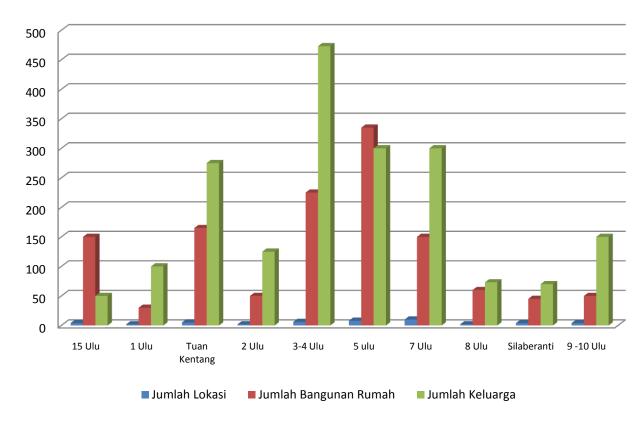
Sumber: Kecamatan SU I Dalam Angka 2009

Ket: -* Data Tidak Tersedia

Tabel 4.9. Jumlah Pemukiman Kumuh, Bangunan Rumah dan Jumlah Keluarga Di Kecamatan SU I Pada Tahun 2009

Kelurahan	Pemukiman Kumuh			
	Jumlah	Jumlah Bangunan	Jumlah	
	Lokasi	Rumah	Keluarga	
1. Kelurahan 15 Ulu	4	150	50	
2. Kelurahan 1 Ulu	2	30	100	
3. Kelurahan Tuan Kentang	5	165	275	
4. Kelurahan 2 Ulu	2	50	125	
5. Kelurahan 3-4 Ulu	6	225	473	
6. Kelurahan 5 ulu	8	335	300	
7. Kelurahan 7 Ulu	10	150	300	
8. Kelurahan 8 Ulu	2	60	73	
9. Kelurahan Silaberanti	4	45	70	
10. Kelurahan 9 -10 Ulu	4	50	150	

Jumlah Pemukiman Kumuh, Bangunan Rumah dan Jumlah Keluarga Di Kecamatan SU I Pada Tahun 2009



4.2. Tinjauan Data Lokasi Kumuh Tahun 2002 dan 2009

Berdasarkan pedoman identifikasi kumuh tahun 2002, hasil penilaian bobot skoring tingkat kekumuhan terdiri dari 3 klasifikasi yaitu :

- 1) Kumuh Rendah
- 2) Kumuh Sedang
- 3) Kumuh Tinggi

Sedangkan berdasarkan pedoman identifikasi kumuh tahun 2009, hasil penilaian bobot skoring tingkat kekumuhan terdiri dari 4 klasifikasi yaitu :

- 1) Tidak Kumuh
- 2) Kumuh Sedang
- 3) Kumuh Berat
- 4) Sangat Kumuh

Hasil penyusunan data base permukiman kumuh tahun 2002 terdapat 48 kelurahan di Kota palembang yang termasuk kategori kumuh.

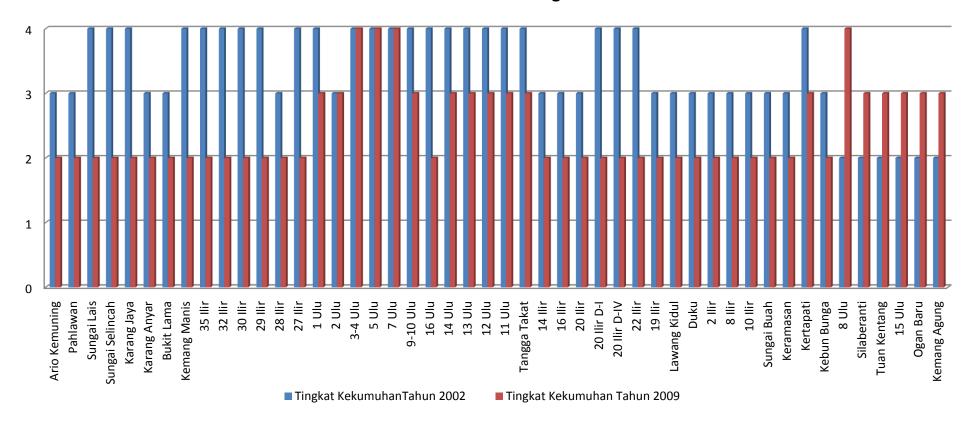
Tabel 4.10. Data Permukiman Kumuh Kota Palembang tahun 2002 dan 2009

No	Kecamatan	Kelurahan	Tingkat Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
			Tahun 2002	Tahun 2009
1	Kemuning	Ario Kemuning	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
2	Kemuning	Pahlawan	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
3	Kalidoni	Sungai Lais	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
4	Kalidoni	Sungai Selincah	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
5	Gandus	Karang Jaya	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
6	Gandus	Karang Anyar	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
7	Ilir Barat I	Bukit Lama	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
8	Ilir Barat II	Kemang Manis	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang

9	Ilir Barat II	35 Ilir	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
10	Ilir Barat II	32 Ilir	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
11	Ilir Barat II	30 Ilir	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
12	Ilir Barat II	29 Ilir	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
13	Ilir Barat II	28 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
14	Ilir Barat II	27 Ilir	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
15	Seberang Ulu I	1 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Berat
16	Seberang Ulu I	2 Ulu	Kumuh Berat	Kumuh Berat
17	Seberang Ulu I	3-4 Ulu	Sangat Kumuh	Sangat Kumuh
18	Seberang Ulu I	5 Ulu	Sangat Kumuh	Sangat Kumuh
19	Seberang Ulu I	7 Ulu	Sangat Kumuh	Sangat Kumuh
20	Seberang Ulu I	9-10 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Berat
21	Seberang Ulu II	16 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
22	Seberang Ulu II	14 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Berat
23	Seberang Ulu II	13 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Berat
24	Seberang Ulu II	12 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
25	Seberang Ulu II	11 Ulu	Sangat Kumuh	Kumuh Berat
26	Seberang Ulu II	Tangga Takat	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
27	Ilir Timur I	14 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
28	Ilir Timur I	16 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
29	Ilir Timur I	20 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
30	Ilir Timur I	20 Ilir D-I	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
31	Ilir Timur I	20 Ilir D-IV	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
32	Bukit Kecil	22 Ilir	Sangat Kumuh	Kumuh Sedang
33	Bukit Kecil	19 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
34	Ilir Timur II	Lawang Kidul	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
35	Ilir Timur II	Duku	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
36	Ilir Timur II	2 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
37	Ilir Timur II	8 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
38	Ilir Timur II	10 Ilir	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
39	Ilir Timur II	Sungai Buah	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
40	Kertapati	Keramasan	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
41	Kertapati	Kertapati	Sangat Kumuh	Kumuh Berat
42	Sukarame	Kebun Bunga	Kumuh Berat	Kumuh Sedang
43	Seberang Ulu I	8 Ulu	Kumuh Sedang	Sangat Kumuh
44	Seberang Ulu I	Silaberanti	Kumuh Sedang	Kumuh Berat
45	Seberang Ulu I	Tuan Kentang	Kumuh Sedang	Kumuh Berat
46	Seberang Ulu II	15 Ulu	Kumuh Sedang	Kumuh Berat
47	Kertapati	Ogan Baru	Kumuh Sedang	Kumuh Berat
48	Kertapati	Kemang Agung	Kumuh Sedang	Kumuh Berat
G 1	er · Profil Strategis Penat	/D	ukiman Kumuh Dalam	Kota Palembang

Sumber: Profil Strategis Penataan/Penanganan permukiman Kumuh Dalam Kota Palembang

Data Permukiman Kumuh Kota Palembang tahun 2002 dan 2009



Keterangan:

- 1 = Tidak Kumuh
- 2 = Kumuh Sedang
- 3 = Kumuh Berat
- 4 = Sangat Kumuh

4.3 ANALISA

4.3.1 Hasil Analisis Tingkat Kekumuhan

Berdasarkan hasil penilaian (scoring I, scoring II, scoring III) terhadap kelurahan 5 Ulu yang terpilih sesuai acuan teknis identifikasi permukiman kumuh, maka didapatkan derajat tingkat kekumuhan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.11.

Hasil Perhitungan Scoring I, Scoring II dan Scoring III

N	0	KELURAHAN	KECAMATAN	DERAJAT KEKUMUHAN
1	1	5 ULU	SEBERANG ULU I	5,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Sesuai dengan kriteria teknis derajat kekumuhan di mana tingkat derajat kekumuhan dimana penilaian tingkat kekumuhan adalah sebagai berikut :

• Jumlah tingkat kekumuhan sama dengan 1 : Tidak kumuh

• Jumlah tingkat kekumuhan antara 1 s/d sama dengan 3 : Kumuh sedang

• Jumlah tingkat kekumuhan antara 3 s/d 5 : Kumuh berat

• Jumlah tingkat kekumuhan sama dengan 5 : Sangat kumuh

Maka derajat kekumuhan hasil penilaian tingkat kekumuhan adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.12. Hasil Derajat Kekumuhan Usulan Lokasi Kawasan Kumuh

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	DERAJAT KEKUMUHAN	KLASIFIKASI
1	5 ULU	SEBERANG ULU I	5,00	Sangat Kumuh

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan usulan derajat kekumuhan tersebut maka ditentukan peringkat kekumuhan sesuai hasil penilaian tingkat kekumuhan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.13.

Peringkat Derajat Kekumuhan Usulan Lokasi Kawasan Kumuh

NC	KELURAHAN	KECAMATAN	DERAJAT KEKUMUHAN	KLASIFIKASI
1	5 ULU	SEBERANG ULU I	5,00	Sangat Kumuh

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Untuk hasil perhitungan Scoring I, Scoring II, Scoring III dan Hasil Derajat Kekumuhan Usulan Lokasi Kawasan Kumuh terlampir pada lampiran 1

4.3.2 Perbandingan Hasil Analisa Tingkat Kekumuhan tahun 2002, 2009 dan 2011

Hasil perbandingan tingkat kekumuhan tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.14 Perbandingan Hasil Analisa Tingkat Kekumuhan tahun 2002, 2009 dan 2011

No	Kecamatan	Kelurahan	Tingkat Kekumuhan Tahun 2002	Tingkat Kekumuhan Tahun 2009	Tingkat Kekumuhan Tahun 2011
1	Seberang Ulu I	5 Ulu	Sangat Kumuh	Sangat Kumuh	Sangat Kumuh

Sumber: Hasil Analisa

Dilihat dari perbandingan derajat kekumuhan pada tahun 2002, 2009 dan 2011 maka dapat dilihat bahwa Kelurahan 5 Ulu tetap termasuk kategori sangat kumuh.

4.4 PEMBAHASAN

Kelurahan 5 Ulu dibagi menjadi 2 wilayah pemukiman, 40% di darat dan 60% di daerah aliran sungai. Kondisi penyediaan air bersih di Kelurahan 5 Ulu untuk keperluan mandi dan cuci diambil langsung dari air sungai, sementara untuk keperluan minum diperoleh dengan membeli air galon. Kondisi jamban keluarga/MCK kebanyakan tidak permanen yang salurannya langsung dibuang ke sungai. Kondisi pengelolaan sampah belum memadai, sampah biasanya langsung dibuang ke sungai atau bawah rumah. Tidak terdapat saluran air/drainase. Kondisi jalan setapak ada yang berupa kayu dan cor beton. Jalan kayu atas swadaya masyarakat sendiri, sementara jalan setapak dan jalan lingkungan berupa cor beton dibiaya oleh pemerintah.

Jumlah penduduk sebanyak 27.027 dengan kepadatan per Ha 270 Ha yang artinyasetiap 1 Ha dihuni oleh lebih dari 100 jiwa dengan asumsi sangat padat. Jumlah penduduk miskin pra sejahtera berjumlah 1.718, Sejahtera I berjumlah 1.290, Sejahtera II berjumlah 768, Sejahtera III berjumlah 565 dan Sejahtera III+ berjumlah 269 yang artinya penduduk miskin jauh lebih banyak di daerah Kelurahan 5 Ulu. Kepadatan rumah/ bangunan menurut jenis bangunan permanen sebanyak 2.414, semi permanen sebanyak 3.046 dan kayu sebanyak 603, artinya kondisi rumah/bangunan banyak yang tidak layak huni. Tata letak rumah/bangunan banyak tidak teratur. Kondisi prasarana dan sarana lingkungan dilihat dari penyediaan air bersih, jamban keluarga/MCK, pengelolaan sampah, saluran air/drainase, jalan setapak dan lingkungan masih sangat terbatas dan kurang memadai. Sarana kesehatan ditunjang oleh 1 Rumah sakit, 3 Poliklinik dan 1 Puskesmas Pembantu. Wilayah Kelurahan 5 Ulu memiliki sarana ibadah berupa masjid sebanyak 7 buah dan langgar/musholla sebanyak 19 buah.

Kelurahan 5 Ulu memiliki 62 RT dengan jumlah penduduk 27.027 jiwa. Idealnya, 1 Kelurahan terdiri dari 30 RT, sehingga kesesuaian peruntukkan RT dan RW di wilayah Kelurahan 5 Ulu sangat tidak memadai, oleh karena itu diharapkan pemerintah segera menindak lanjuti hal ini dengan melakukan pemekaran wilayah minimal menjadi 2 kelurahan. Status pemilik lahan/tanah, sebagian yang tinggal di darat memiliki IMB sedangkan pemukiman di daerah aliran sungai sebagian tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan/tanah. Letak/kedudukan lokasi kawasan kumuh sebagian besar berada di daerah aliran sungai. Sehingga dapat disimpulkan dari

sarana dan prasarana lingkungan kondisinya sangat rawan , tingkat derajat kekumuhan sangat tinggi dan penilaian seluruh identifikasi kawasan adalah sangat kumuh.

BAB V

RENCANA PENANGANAN

5.1 PENANGANAN KAWASAN KUMUH

Berdasarkan hasil perumusan kesimpulan akan dirumuskan suatu usulan tindakan penanganan untuk mengantisipasi kawasan permukiman kumuh. Adapun rencana penanganan dan pentahapan tersebut adalah :

a. Cara Penanganan Kawasan Kumuh

Cara penanganan kawasan kumuh mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan
 - Revitalisasi
 - Pemugaran
 - Konservasi
 - Restorasi/Rehabilitasi
 - Rekonstruksi
 - Demolisi
- 2) Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman
 - Konsolidasi Lahan
 - Peremajaan Lingkungan Permukiman
 - Relokasi Kawasan Permukiman

Peningkatan Fasilitas Pendukung dan Rehabilitasi Perumahan
 Permukiman

3) Program Rehabilitasi Sosial

- Penyuluhan Sosial
- Bimbingan Sosial/Ketrampilan
- Stimultant Bahan Pemugaran Perumahan dan Sarana Perbaikan Lingkungan
- Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (BUSEP) atau Kelompok
 Usaha Bersama (KUB)

b. Tahapan Penanganan Kawasan Kumuh

Secara umum, pelaksanaan rencana peningkatan kualitas kawasan kumuh dapat dibagi beberapa tahap yaitu :

1) Tahap Persiapan

Kegiatan-kegiatan utama dalam tahap persiapan:

- Penyiapan Lokasi
- Orientasi Program
- Kampanye Nasional
- Penyiapan Masyarakat

2) Tahap Pelaksanaan

Kegiatan-kegiatan utama dalam tahap pelaksanaan:

- Pelaksanaan Pengguliran Dana Rehabilitasi Rumah Tinggal, Prasarana dan Sarana Lingkungan dan Kegiatan Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga
- 3) Tahap Pengelolaan
- 4) Tahap Pengembangan

c. Arahan Penanganan Kawasan Kumuh

Adapun arahan perbaikan/peningkatan kawasan permukiman khususnya kawasan kumuh di pemukiman bantaran sungai adalah sebagai berikut :

- Konsep pandangan rumah yang membelakangi sungai diarahkan dibalik menjadi menghadap ke sungai dengan cara pembuatan jalan kiri-kanan sungai dilengkapi dengan fasilitas lainnya.
- Komponen-komponen program revitalisasi, rehabilitasi, renovasi, rekonstruksi dan atau preservasi dapat berupa perbaikan sarana dan prasarana, seperti halnya perbaikan sanitasi, drainase, listrik dan air bersih dengan metode atau teknologi yang khusus.
- Pengaturan jalan akses dan tata letak bangunan rumah melalui program perbaikan kampung (KIP)
- Penetapan garis sungai sepanjang 10-30 meter.

d. Lingkup Penanganan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan analisis, maka perlu adanya usaha perbaikan pada prasarana di pemukiman tersebut, antara lain :

- a. Perbaikan pada kamar mandi yang berada di lokasi pemukiman dengan menyediakan WC dan bak mandi dengan harapan tidak ada lagi masyarakat yang membuang air besar di sungai.
- b. Perbaikan pada bangunan menggunakan bahan bangunan yang ekonomis tetapi secara konstruksi dapat menahan beban yang ada.
- c. Perbaikan pada lingkungan dengan cara penataan penghijauan di ruang terbuka
- d. Pembuatan mesin air, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan pompa air atau mengambil air untuk kebetuhan sehari-hari di sungai
- e. Pembuatan septicktank
- f. Perbaikan pengolahan sampah agar tidak merusak lingkungan
 Perbaikan sanitase dan drainase. Perbaikan ini akan mendapat perhatian khusus
 untuk memastikan tersedianya saluran yang cukup baik sebagai sarana
 pelimpahan air di jalan-jalan utama maupun tiap-tiap rumah.
- g. Perbaikan jalan di pemukiman termasuk pembangunan konstruksi jalan baru maupun perbaikan jalan lama
- h. Penanganan persampahan lebih ditekankan pada perbaikan dan peningkatan pelayanan system, pembuatan TPS dan penambahan sarana angkutan sampah.

5.2. Cara Penanganan Kawasan Kumuh di Wilayah 5 Ulu

Tabel 5.1 Cara Penanganan Kawasan Kumuh di Wilayah 5 Ulu

No	Cara penanganan	Sangat kumuh
I	Peningkatan kualitas lingkungan	
a	Revitalisasi	V
b	Pemugaran	V
С	Konservasi	
d	Preservasi	
e	Restorasi/rehabilitasi	
f	Rekonstruksi	
g	Demolisi	
II	Pengendalian pengembangan perumahan permukiman	
a	Konsolidasi lahan	V
b	Peremajaan lingkungan permukiman	
С	Relokasi kawasan perumahan	V
d	Peningkatan fasilitas dan rehabilitasi perumahan	
III	Program rehabilitasI sosial	
a	Penyuluhan sosial	V
b	Bimbingan sosial/ketrampilan	V
С	Stimulan bahan pemugaran/perbaikan perumahan permukiman	V
d	BUSEP/KUB	V

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 1999. Dampak Krisis Moneter. Jurnal Ekonomi dan Kemiskinan. Bussines News.
- Bappeda Kota Palembang. 2002. StrategisPenataan/Penanganan Permukiman Kumuh dalam Kota Palembang.
- Bappeda Kota Palembang. 2010. Palembang Dalam Angka 2009

.

- Kuncoro, Mudrajad. 2004 Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Erlangga Jakarta.
- Kecamatan Seberang Ulu 1 Dalam Angka. Tahun 2009
- Marwati, Gundhi. 2006. Perumahan dan Permukiman Untuk Rakyat, Puslitbang Permukiman Departemen Pekerjaan Umum.
- Sahdan, Gregorius. 2005. Menanggulangi Kemiskinan Desa, Jurnal Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan.
- Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara Jakarta.
- Universitas Diponegoro. 2005. Sejarah Permukiman Kumuh.